

TEKNIK & STRATEGI PENYUSUNAN DOKUMEN: PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Tata Negara,
Senior Partner INTEGRITY Law Firm,
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia.

Jakarta, 19 Desember 2025

www.integritylawfirms.com

AGENDA WEBINAR INTEGRITY SHARING

Agenda webinar INTEGRITY Sharing ini diadakan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun kedepan. Waktu pelaksanaannya 2 (dua) Minggu setelah webinar Australia, INTEGRITY Lawyers, diadakan.

1. Menjadi Advokat yang Cuan dan Cendekiawan
2. Menjadi Lawyer Hebat: Mengasah Keahlian Menulis
3. Seni Berbicara Meyakinkan: Skill Wajib Lawyer Hebat
4. Menjadi Lawyer Handal: Mengasah Kemampuan Bernegosiasi
5. Teknik & Strategi Penyusunan Dokumen: Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi
6. Tips dan Trik Mencari Klien

AGENDA WEBINAR INTEGRITY SHARING

Agenda webinar INTEGRITY Sharing ini diadakan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun kedepan. Waktu pelaksanaannya 2 (dua) Minggu setelah webinar Australia, INTEGRITY Lawyers, diadakan.



INTEGRITY
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

ALUR PEMBAHASAN



www.integritylawfirms.com

1. PROFIL INTEGRITY LAW FIRM
2. DASAR HUKUM
3. KEWENANGAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI
4. PENGALAMAN PENANGANAN PERKARA
5. MENJAGA MORALITAS DAN INTEGRITAS PERADILAN

1

PROFIL INTEGRITY LAW FIRM



www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

SIAPAKAH KAMI?

INTEGRITY adalah satu-satunya Law Firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. INTEGRITY didirikan oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Senior Partner INTEGRITY

- Guru Besar Hukum Tata Negara
- Guru Tamu (*Visiting Professor*) Melbourne University Law School (2016-2019)
- Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014)
- Staf Khusus Presiden Republik Indonesia di Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN (2008-2011)

IZIN PRAKTIK DI AUSTRALIA

Pada tanggal 23 Mei 2022, Prof. Denny Indrayana menerima izin Praktik Advokat tahun 2021-2022 dari *Victorian Legal Service Board and Commissioner* untuk berpraktik di negara bagian Victoria, Australia, berdasarkan *Order of Victorian Supreme Court*.

Setelah melewati proses yang panjang, Prof. Denny Indrayana diangkat sebagai *Principal Lawyer* pada 20 September 2022 dan mempunyai hak untuk membuka kantor di Australia.



TERDAFTAR PADA:

- ✓ **Supreme Court of Victoria**
- ✓ **Department of Home Affair Australia**
- ✓ **BDM (Birth, Death, Marriage), Victoria**



IN TE
GRI TY

Satu-satunya

LAWYER

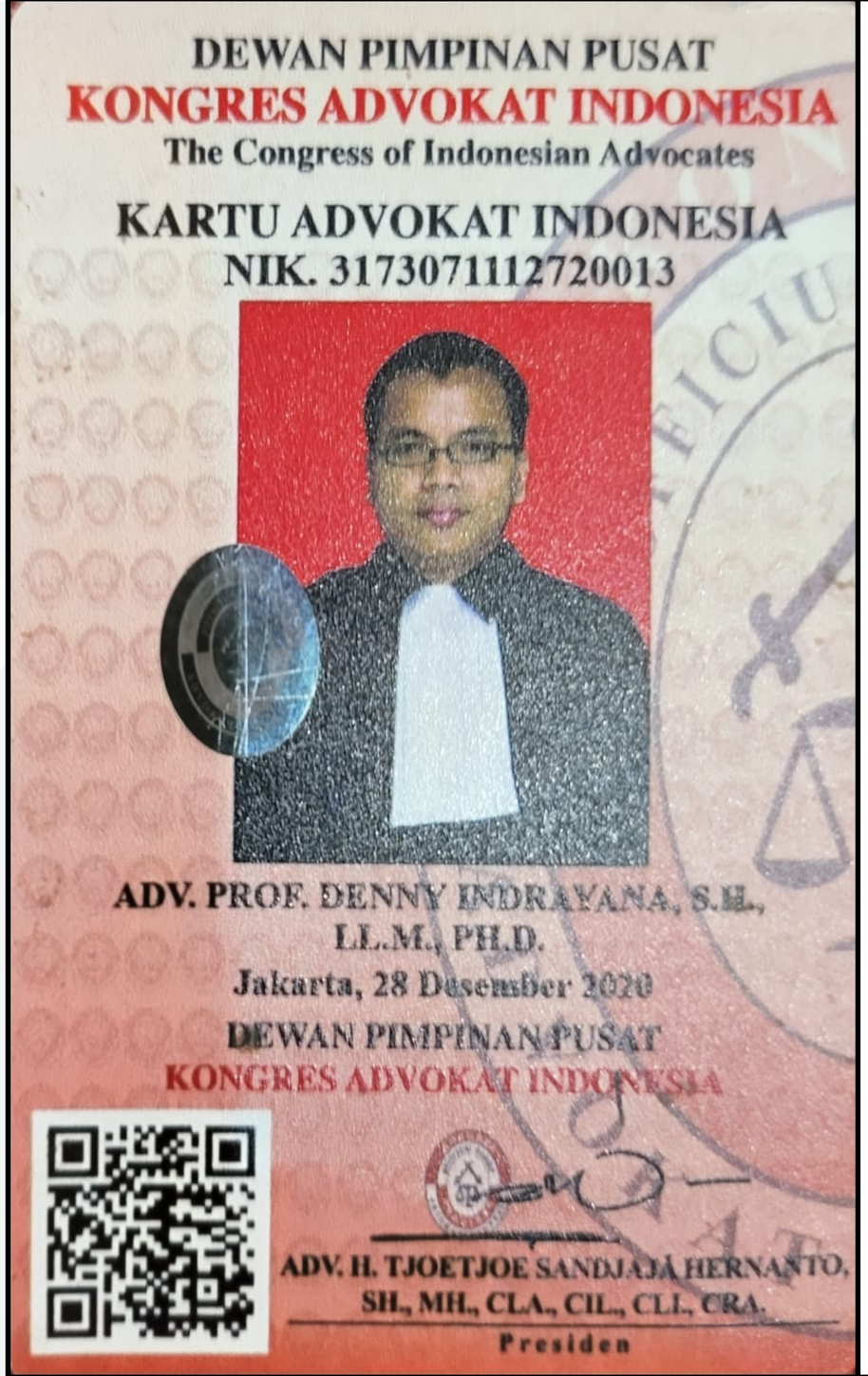
yang berizin

Praktik di

INDONESIA

dan

AUSTRALIA



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates

KARTU ADVOKAT INDONESIA
NIK. 3173071112720013

ADV. PROF. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D.
Jakarta, 28 Desember 2020
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

ADV. H. TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO, SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA.
Presiden

AUSTRALIAN
PRACTISING CERTIFICATE

2025-26 PRACTISING YEAR

Denny Indrayana

Practitioner Number: P0056281
is authorised to engage in legal practice:

- from 01 July 2025 to 30 June 2026;
- as a principal of a law practice; and
- is not authorised to receive trust money.

The following additional conditions apply:
- NIL

Issued pursuant to the Legal Profession Uniform Law (Victoria)
Practising Certificate Number: 1252600562817

signed by Fiona McLeay, Chief Executive Officer
on behalf of the Victorian Legal Services Board and Commissioner

The Victorian Legal Services Board and Commissioner acknowledge Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the Traditional Custodians of the land and pay respect to their Elders past and present.

LEGAL PROFESSION Uniform Law

Victorian Legal Services BOARD + COMMISSIONER

Level 27, 500 Bourke Street, Melbourne 3000 | Victorian Legal Services Board ABN 82 518 945 610
Victorian Legal Services Commissioner ABN 66 489 344 310

Victorian Legal Services BOARD + COMMISSIONER

INTEGRITY
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

BIDANG KERJA



INDONESIA

- Business Competition Disputes
- Corporate Law
- Tax Law
- immigration Law
- Land Disputes
- Civil Law
- State Administration Claims
- Constitutional Law Disputes
- Constitutional Review at the Constitutional Court
- Judicial Review at the Supreme Court
- Good Governance
- Drafting of Public & Corporate Regulation
- Natural Resources Disputes
- Intellectual Property Rights
- Environmental Law
- Family Law

INTEGRITY LAWYERS

BIDANG KERJA



AUSTRALIA

- Migration
- Dispute Resolution & Litigation
- Family & Relationship
- Employment & Industrial
- Criminal Law
- Personal Injury
- Intellectual Property & Technology
- Franchising & Leasing
- Property & Planning
- Taxation
- Commercial & Business
- Human Rights
- Consumer & Competition
- Bankruptcy & Debt
- Wills & Estate
- Banking & Finance
- Administrative & Government
- Environmental
- Contract & Agreement



2

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. UU Kekuasaan Kehakiman;
3. UU Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang **Persidangan Mahkamah Konstitusi**;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang **Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.**





Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945

1) Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2) Mahkamah Konstitusi **wajib** memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

integrity@integritylawfirms.com



3

KEWENANGAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

integrity@integritylawfirms.com



KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Memutus pembubaran partai politik

Sumber: Pasal 24C UUD 1945

Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

Kewajiban: Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum

BAGAIMANA DENGAN KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* ?

DEFINISI

Pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan pengadilan (**khususnya Mahkamah Konstitusi**) karena suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatnya pejabat publik, telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan.

INDONESIA

Lantas, apakah Indonesia mengenal *constitutional complaint*?

Hingga saat ini secara normatif, Indonesia belum mengenal *constitutional complaint*. Hal ini dibuktikan dengan **belum adanya lembaga peradilan** yang diberikan kewenangan *constitutional complaint*, **termasuk Mahkamah Konstitusi**.

Sumber: I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Hal xiii - xiv*

Belajar dari negara Jerman?

Pengadilan Konstitusi Jerman adalah **salah satu dari pengadilan konstitusi** di dunia yang **secara tegas memiliki wewenang *constitutional complaint***, yang diatur dalam Konstitusi.



Contoh kasus

Contoh kasus *constitutional complaint* yang cukup terkenal di Jerman yaitu mengenai pengaduan konstitusional mengenai **larangan penyembelihan hewan**.

Masyarakat muslim Jerman, merasa berkeberatan dengan larangan tersebut dan mengadukan *constitutional complaint* ke ***Mahkamah Konstitusi Jerman*** karena dinilai bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama yang dijamin oleh konstitusi Jerman.

Data penanganan kasus constitutional complaint

Mahkamah Konstitusi Jerman menangani sekitar **6.000 hingga 6.500** kasus *constitutional complaint* **per-tahun**
(sumber website MK: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14764&menu=2)

Sumber: Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No.1, Juni 2012. Hal. 157.*

PERKEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Pengujian Undang-Undang Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945

Dalam Putusan MK Nomor 066/PUU-11/2004, tertanggal 12 April 2005 yang menguji Pasal 50 UU MK. MK berwenang menguji undang-undang yang diundangkan sebelum dan setelah perubahan UUD 1945.



Batas Waktu Pengujian Formil Undang-Undang

Batas waktu pengujian formil Undang-Undang melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010 yang menguji UU Mahkamah Agung. MK menyatakan batas waktu pengajuan uji formil undang-undang paling lama 45 hari sejak diundangkan.



MK Berwenang Menguji Perppu

Melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009
pada 8 Februari 2010,
MK Berwenang Menguji
Perppu terhadap UUD 1945



MK Berwenang Memutus Perselisihan Hasil Pilkada

Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada 19 Mei 2014, MK menyatakan bahwa kewenangan memutus PHPKADA bukan merupakan kewenangan MK karena Pilkada bukan termasuk rezim Pemilu. Untuk itu, MK memerintahkan pembentuk undang-undang membentuk badan peradilan khusus Pilkada. Sebelum badan peradilan khusus terbentuk, MK tetap menjalankan kewenangan tersebut. Melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 pada 29 September 2022, MK menyatakan kewenangan dalam memutus PHPKADA bersifat permanen

integrity@integritylawfirms.com



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Fungsi Mahkamah Konstitusi

- **Pengawal Konstitusi**
  (The Guardian of The Constitution)
- **Penafsir Tunggal Konstitusi**
  (The Final Interpreter of The Constitution)
- **Pengawal Demokrasi**
  (The Guardian of The Democracy)
- **Pelindung Hak-Hak Konstitusi Warga Negara**
  (The Protector of The Citizen's Constitutional Rights)
- **Pelindung HAM**
  (The Protector of The Human Rights)

MENGENAL DAN MEMAHAMI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN

- Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia, mempunyai genre yang bervarian dalam memutus perkara. Ada yang bermodel sangat ***activism***, ada juga yang bermodel sangat ***restraint***.

- Juga bergantung pada komposisi hakim. Perubahan putusan itu ada di seluruh dunia. Mahkamah Konstitusi **tidak wajib ada dalam satu koridor yang Tunggal**.

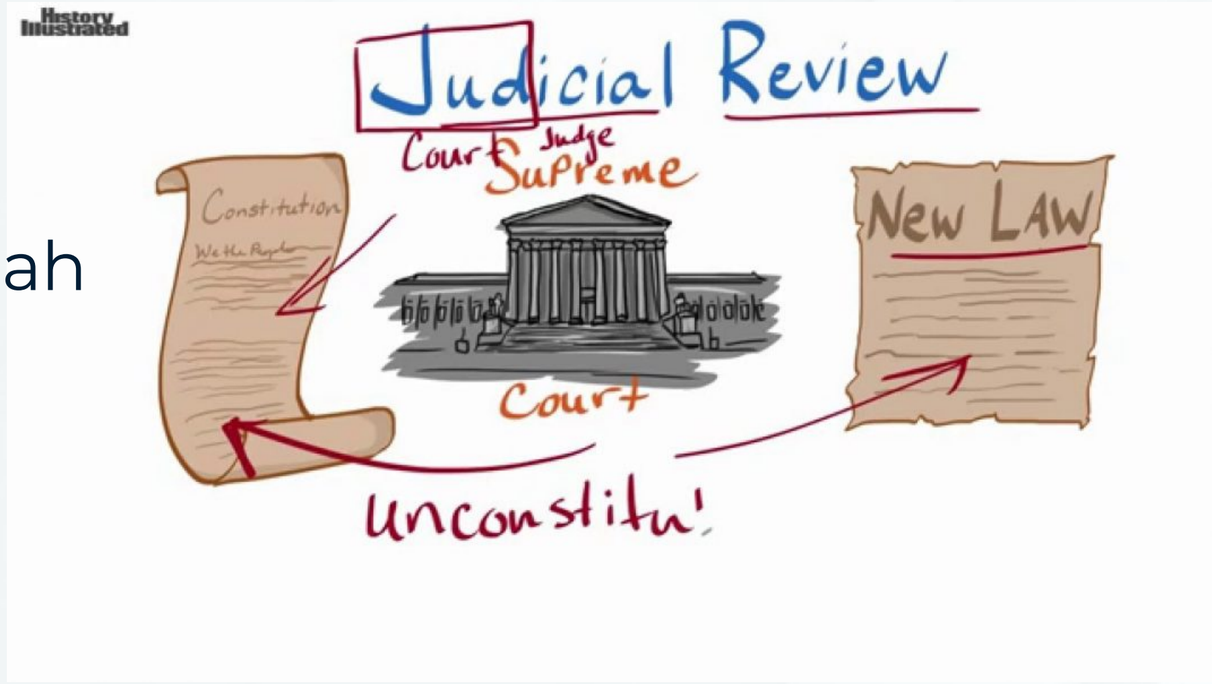
- Menaruh MK dihadapan Demokrasi memang menjadi menarik. Memberikan MK lebih banyak untuk mengatur semua hal, itu juga bisa dikategorikan sebagai juristokrasi. Tetapi, pada saat yang sama ketika kondisi politik tidak pas/sesuai, kita **memerlukan MK yang lebih aktif**.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



APA ITU PENGUJIAN UU (*JUDICIAL REVIEW*) ?

Judicial review atau pengujian yudisial adalah **proses pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan**. *Judicial review* dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.



Di Indonesia, *judicial review* dilakukan oleh **Mahkamah Agung (MA)** dan **Mahkamah Konstitusi (MK)**.

integrity@integritylawfirms.com

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG *(JUDICIAL REVIEW)*

a. Pengujian Formil

Pengujian UU dan Perppu yang berkaitan dengan proses pembentukan UU dan hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil (substansi).

Dasar Hukum: (Pasal 2 ayat (3) PMK 7 Tahun 2025)

Contoh: Putusan MK Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Uji Formil UU Nomor 5/2004 tentang MA. (Putusan MK: Meski pembentukan UU *a quo* terbukti cacat prosedur, namun demi asas kemanfaatan hukum, UU *a quo* tetap berlaku)

VS

b. Pengujian Materiil

Pengujian UU dan Perppu yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dasar Hukum: (Pasal 2 ayat (5) PMK 7 Tahun 2025)

Contoh: Putusan MK Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 tentang Uji Materil Pasal 1 angka 28, 52 ayat (1) dan (2), dan Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

TEKNIS PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA *OFFLINE*



Pemohon datang menghadap Pranata Peradilan Registrasi Perkara untuk mendaftarkan permohonan



Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan dalam buku penerimaan permohonan, selanjutnya Pemohon menyerahkan berkas permohonan sebanyak 12 rangkap



Pranata Peradilan Perkara memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan pasal 29 dan 31 UU nomor 8 tahun 2011, yang hasilnya dituangkan dalam formulir ceklis dan membuat lembar disposisi selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda



Berkas diproses oleh internal Mahkamah Konstitusi



Pranata Peradilan Perkara menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian mencatat dalam BRPK dan membuat tanda terima permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon



Pemohon telah selesai melakukan pendaftaran permohonan



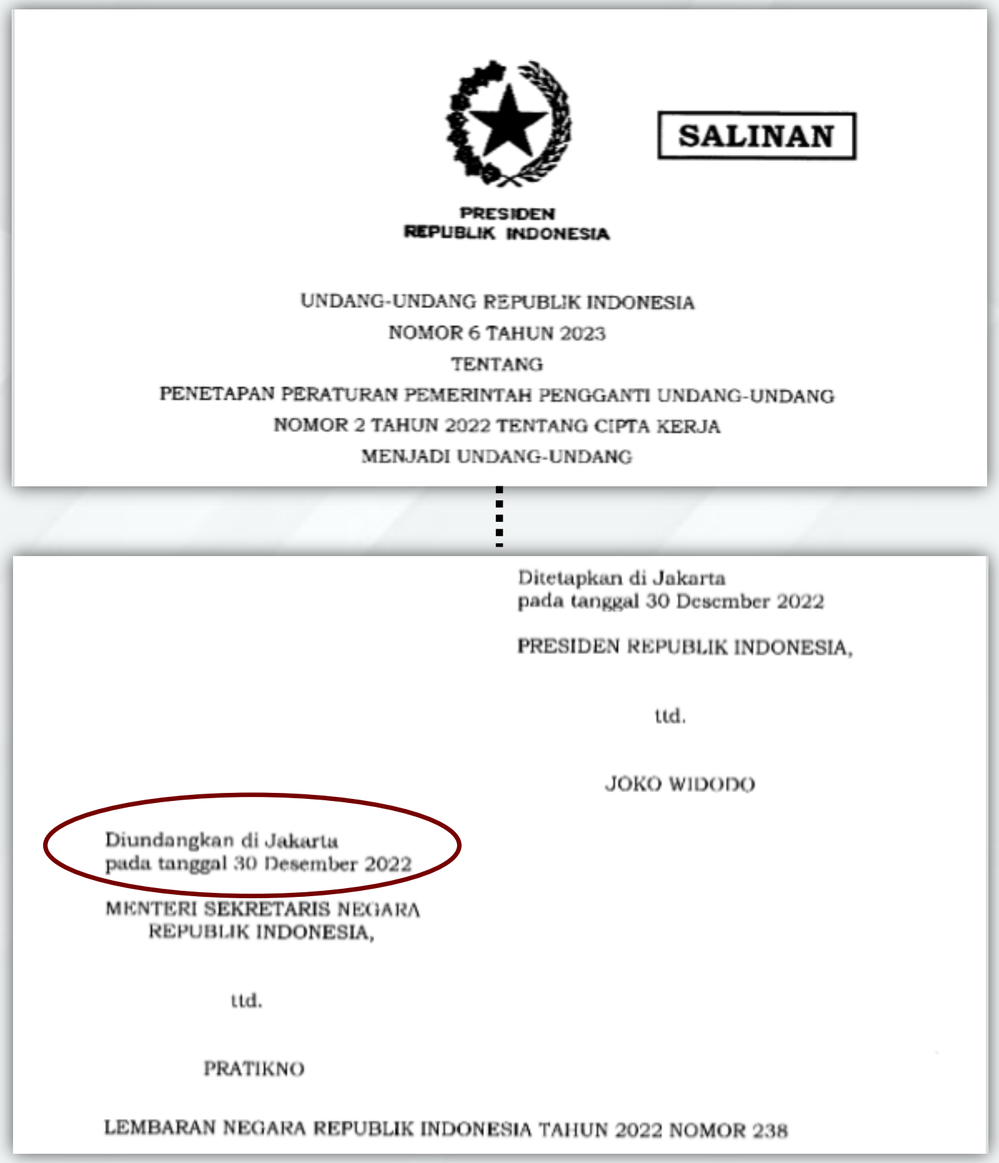
Sumber: Website MK

TEKNIS PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA *ONLINE*



Sumber: Website MK

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL KE MAHKAMAH KONSTITUSI



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 238

Berbeda dengan pengujian materiil yang tidak memiliki batas waktu, pengajuan permohonan pengujian formil UU dan Perppu ke Mahkamah Konstitusi adalah **45 (empat puluh lima hari) setelah UU diundangkan.**

(Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 *juncto* Pasal 9 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025)

Note: untuk pengujian formil tidak ada batas waktu .

integrity@integritylawfirms.com

SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

- Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

integrity@integritylawfirms.com

VARIASI PUTUSAN MK DARI MASA KE MASA

2003 – 2008 (UU 24/2003 tentang MK)

Pasal 56-57 UU MK menyatakan putusan terdiri dari 3 (tiga) jenis:

1. **Tidak dapat diterima**, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formil;
2. **Dikabulkan**, dalam hal terdapat pasal yang bertentangan dengan UUD 194; dan
3. **Ditolak**, dalam hal tidak ada pertentangan dengan norma dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

2008 (Putusan No. 10/PUU-VI/2008)

Pertama kalinya dikenal **putusan Konstitusional Bersyarat**. Dalam putusan model ini, MK memberikan pemaknaan terhadap sebuah norma. Tak jarang MK dianggap telah masuk ke dalam ranah *positive legislator*.

2011 (UU 8/2011 perubahan MK)

Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Pada tahun 2011 MK kembali mempertegas bahwa putusan **tidak boleh memuat**:

- 1. Amar selain tidak menerima, mengabulkan, atau menolak;
- 2. Perintah kepada pembentuk UU; dan
- 3. Rumusan norma baru sebagai pengganti norma lama.

2011 - Sekarang (Putusan No. 48/PUU-IX/2011)

MK membatalkan Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Sehingga saat ini, putusan MK dapat memuat amar 'Konstitusional Bersyarat' selain:

1) tidak dapat diterima;

2) dikabulkan;

3) ditolak.

integrity@integritylawfirms.com

NE BIS IN IDEM

Pasal 72 PMK 7/2025:

(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, ***tidak dapat dimohonkan pengujian kembali****.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda ***atau*** *terdapat alasan permohonan yang berbeda.*



integrity@integritylawfirms.com

ULTRA PETITA PUTUSAN MK

Ultra petita adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui petitum Pemohon.

Ultra Petita dimungkinkan secara terbatas karena fungsi MK sebagai the ***guardian of the Constitution.***

Menjaga konstitusionalitas norma undang undang.



integrity@integritylawfirms.com

BENTUK ULTRA PETITA

01 Putusan Bersyarat

02 Perumusan Makna Norma leh MK

03 Penundaan keberlakuan Norma



CONTOH ULTRA PETITA PUTUSAN MK

Putusan MK atas pengujian formil UU Cipta Kerja mengandung sifat **ultra petitum** karena MK tidak berhenti pada fungsi menguji konstitusionalitas norma sebagaimana batas kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tetapi justru **membentuk konstruksi norma baru (skema masa perbaikan, tata cara transisi, pembatasan tindakan pemerintah) yang tidak diminta secara eksplisit dalam petitum para pemohon dan pada hakikatnya termasuk ranah pembentukan undang-undang oleh Presiden dan DPR menurut UUD 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi PARA PEMOHON
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo.*

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

integrity@integritylawfirms.com

PRISIP ERGA OMNES DALAM PUTUSAN PUU



- Prinsip Erga Omnes dalam Putusan PUU

- Putusan MK dalam perkara PUU berlaku umum (erga omnes).
- Akibat hukumnya:
  - Mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara
  - Norma yang dibatalkan tidak dapat lagi diterapkan
- Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa putusan MK berlaku sejak diucapkan, kecuali ditentukan lain.

integrity@integritylawfirms.com

Penjabaran lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengajuan permohonan Pengujian Undang-Undang akan disampaikan **secara komprehensif** oleh **narasumber berikutnya**.

integrity@integritylawfirms.com



4

PENGALAMAN INTEGRITY BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

integrity@integritylawfirms.com

PENGALAMAN INTEGRITY MENANGANI PERKARA PENGUJIAN UU DI MK (1/2)

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (PUU)

- ✓ PUU Materiil ***Presidential Threshold***, Nomor 49/PUU-XVI/2018
- ✓ PUU Materiil **Menyelamatkan Suara Rakyat**, Nomor 20/PUU-XVII/2019
- ✓ PUU Materiil ***Presidential Threshold*** mewakili Diaspora Indonesia, Nomor 8/PUU-XX/2022
- ✓ PUU Materiil ***Presidential Threshold*** mewakili Partai Ummat, Nomor 11/PUU-XX/2022
- ✓ PUU Materiil ***Presidential Threshold*** mewakili DPD RI dan Partai Bulan Bintang, Nomor 52/PUU-XX/2022





integrity@integritylawfirms.com

PENGALAMAN INTEGRITY MENANGANI PERKARA PENGUJIAN UU DI MK (2/2)



Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (PUU)

- ✓ PUU Formil **Perppu Cipta Kerja** mewakili 13 Serikat Buruh, Nomor 14/PUU-XXI/2023
- ✓ PUU Formil **UU Cipta Kerja** mewakili 13 Serikat Buruh, Nomor 54/PUU-XXI/2023
- ✓ PUU Materiil **UU Pengelolaan Zakat**, mewakili Yayasan Dompet Dhuafa dan Perkumpulan Forum Zakat Jakarta, Nomor 97/PUU-XXII/2024
- ✓ PUU Materiil **UU Tabungan Perumahan Rakyat**, mewakili 11 Serikat Buruh, Nomor 134/PUU-XXII/2024





integrity@integritylawfirms.com

PENGALAMAN INTEGRITY MENANGANI PERKARA KEPEMILUAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sengketa Pemilihan Umum Presiden

- ✓ Sengketa PHPU Presiden, Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019

Sengketa Pemilihan Gubernur

- ✓ Sengketa PHPKADA Gubernur Kalimantan Selatan, Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021
- ✓ Sengketa PHPKADA Gubernur Kalimantan Selatan, Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021

Sengketa Pemilihan Umum Legislatif

- ✓ Sengketa PHPU DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD XXII/2024
- ✓ Sengketa PHPU DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I, Nomor 196-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024







Pengalaman INTEGRITY Menangani Perkara Kepemiluan di Mahkamah Konstitusi

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024/2025

- ✓ Sengketa PHP KADA **Provinsi Jawa Tengah**, Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025,
- ✓ Sengketa PHP KADA **Provinsi Maluku Utara**, Perkara Nomor 245/PHPU.GUB-XXIII/2025, 251/PHPU.GUB-XXIII/2025, dan 258/PHPU.GUB-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kota Banjarbaru**, Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kabupaten Pulau Morotai**, Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 69/PHPU.BUP-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kota Tomohon**, Perkara Nomor 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kota Pekanbaru**, Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kabupaten Kolaka Utara**, Perkara Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kabupaten Kepulauan Tanimbar**, Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 243/PHPU.BUP-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kabupaten Kapuas**, Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kabupaten Halmahera Barat**, Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 203/PHPU.BUP-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kabupaten Oku Selatan**, Perkara Nomor 136/PHPU.BUP-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kota Batam**, Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025
- ✓ Sengketa PHP KADA **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025



MENYELAMATKAN PULAU KECIL WAWONI DARI MAFIA TAMBANG

Selain menjadi Pemohon dalam beberapa perkara Pengujian UU di MK, INTEGRITY juga pernah **menjadi Pihak Terkait** mewakili masyarakat Wawonii dalam perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) di Mahkamah Konstitusi.





integrity@integritylawfirms.com



5

MENJAGA MORALITAS DAN INTEGRITAS PERADILAN

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

integrity@integritylawfirms.com

REALITAS PENEGAKAN HUKUM SAAT INI

01

Banyak kebijakan hukum yang lahir bukan karena kebutuhan keadilan, tetapi demi kalkulasi politik.

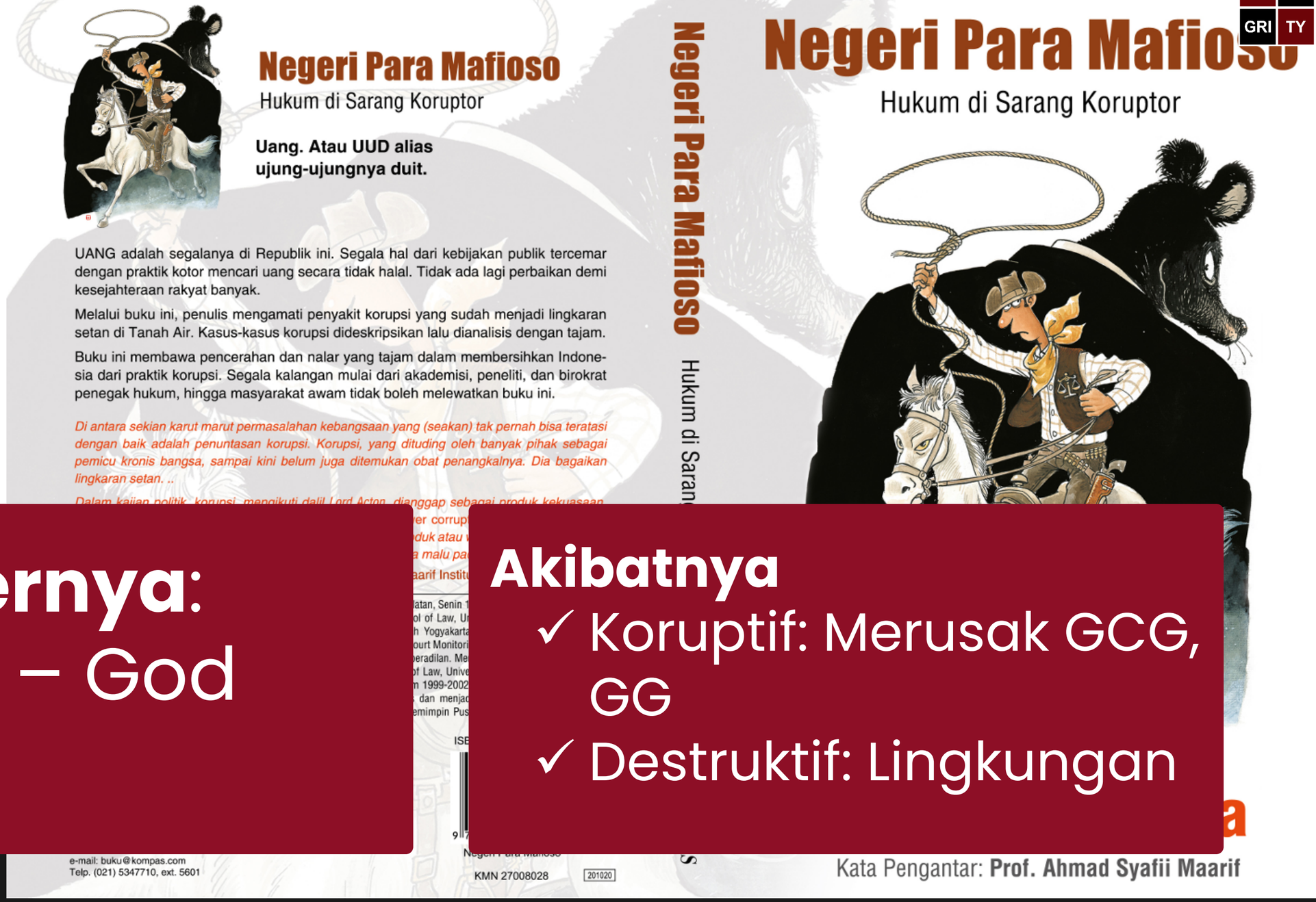
02

Fenomena **mafia peradilan**: jual beli perkara, pengaturan vonis, markus (makelar kasus), suap aparat, dan intervensi kekuasaan

03

Dari moral collapse menuju ***justice collapse***

OLIGARKI



Karakternya:
Mafioso – God Father

Akibatnya

- ✓ Koruptif: Merusak GCG, GG
- ✓ Destruktif: Lingkungan

DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI

- Daulat Rakyat Dibajak Daulat Duit
- Yang Menang Tidak Boleh Curang
- Kalau Mau Menang Harus Pakai Uang
- Dua tandem Strategi: Politik Uang, Politik Curang





PENYEBAB MAFIA HUKUM BUKAN SEKADAR MASALAH TEKNIS ATAU KARENA MINIMNYA PENGAWASAN

Sebagian besar akar masalah yang menyebabkan suburnya praktek mafia hukum bukanlah semata-mata masalah teknikal, **namun sistemik dan berhubungan dengan masalah kepemimpinan**, budaya, dan sebagainya

AKAR MASALAH MAFIA HUKUM

01 **Kelemahan Peraturan**





Gaji/Tunjangan & Anggaran Kurang Memadai 02

03 **Kelemahan Pengawasan Internal dan Eksternal serta Sanksi**





Kelemahan Kepemimpinan
(kurang Integritas, ketegasan, kemampuan mendorong perubahan) 04

05 **Kelemahan Manajemen SDM**
(Rekrutmen, Mutasi, Promosi, Evaluasi Kinerja, dsb)





Kelemahan Sistem Penanganan Perkara
(minim check and balances, batas waktu, akses informasi) 06

INTEGRITAS SEBAGAI FONDASI KEADILAN

1

Integritas berarti konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan.



2

Tanpa integritas, hukum kehilangan ruhnya.

PENGUATAN AKUNTABILITAS PERADILAN DALAM KERANGKA REFORMASI YUDISIAL (1/2)

www.integritylawfirms.com

01

Reformasi Sistem Peradilan (*Judicial Reform*)

- ✓ Penguatan *judicial accountability*: sistem transparansi, publikasi putusan, dan pelaporan kekayaan aparat peradilan.
- ✓ Penguatan Komisi Yudisial, MA, dan lembaga pengawas internal yang benar-benar independen

02

Etika dan Moralitas Penegakan Hukum

- ✓ Pendidikan etik dan karakter bagi calon hakim, jaksa, dan advokat.
- ✓ Revitalisasi sumpah jabatan sebagai panggilan moral, bukan sekadar formalitas.

03

Digitalisasi Peradilan

- ✓ Sistem e-court, e-litigation, dan e-audit untuk menekan interaksi langsung yang berpotensi suap.
- ✓ Pemanfaatan teknologi untuk membuka ruang pengawasan publik.

PENGUATAN AKUNTABILITAS PERADILAN DALAM KERANGKA REFORMASI YUDISIAL (2/2)

04

Peran Masyarakat dan Media

- ✓ Public control dan social accountability dalam memantau proses hukum.
- ✓ Media massa dan civil society sebagai watchdog keadilan.

05

Kepemimpinan Berintegritas

- ✓ Keteladanan di puncak lembaga peradilan menentukan budaya di bawahnya.
- ✓ “Integritas tidak bisa diwariskan, tetapi bisa diteladankan.”



“Jika satu hakim bersih, satu perkara akan adil. Jika seluruh sistem bersih, **negara akan bermartabat**.”

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy









https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/



https://www.integritylawfirms.com

integrity@integritylawfirms.com

We are the INTEGRITY





Jakarta, Indonesia

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825.
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, **Jakarta** 10220
Phone : +62 21 2555 8836

Melbourne and Sydney, Australia

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Phone : 1300 912 889

Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Sydney, NSW 2000
Phone : 1300 912 889

www.integritylawfirms.com